BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Usaha produk makanan merupakan usaha yang memiliki batas kadaluarsa untuk dikonsumsi oleh manusia sehingga memerlukan jaminan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Toko merupakan tempat produsen dalam menitipkan produknya hingga berada dalam tangan pembeli, namun pihak toko tidak mau menerima barang apabila tidak terdapat jaminan atas produk yang dititipkan. Oleh karena itu, pihak produsen memberikan masa garansi pada toko terhadap produk khususnya keripik usus. Produk keripik usus memiliki masa kadaluarsa yang cepat apalagi pada produk rumahan sehingga pihak toko memerlukan garansi dan produsen memberikan garansi 30 hari. Dalam waktu 30 hari apabila produk belum laku terjual maka produsen akan mengganti dengan produk yang baru. Produsen berani memberikan jaminan 1 bulan karena produsen sudah memastikan kualitas rasa dan tekstur bertahan sampai 1 bulan, kebersihan dan keamanan produk, bebas dari bahan tambahan berbahaya, tidak mengandung zat beracun, aman dikonsumsi, pengemasan menggunakan bahan anti lembap ataupun kedap udara, sudah di uji coba sendiri sebelum edar bahwa selama 1 bulan lebih tidak ada berubah tekstur, rasa, dan tidak lembap, menggunakan bahan segar dan berkualitas seperti usus nya fresh baru motong dari pabriknya,

proses pengolahan yang tepat seperti pembersihan, pengeringan, penggorengan menggunakan bahan pengawet alami seperti gula dan garam.²

Produk keripik usus ini belum mendapatkan izin yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen, seperti kemungkinan terkontaminasi bahan berbahaya. Selain itu, produsen mungkin menghadapi sanksi hukum, kehilangan reputasi, dan kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara resmi. Sedangkan dampak dari keripik usus yang sudah mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang menunjukkan bahwa produk telah memenuhi standar keamanan dan kualitas.³ Hal ini memberikan jaminan kepada konsumen mengenai keamanan makanan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas pangsa pasar karena produk dapat dipasarkan secara resmi. Konsumen menuntut produsen karena produk yang dijualnya belum mendapatkan izin. Bentuk tuntutananya yaitu memberikan penjelasan mengenai asal-usul bahan, proses produksi, dan jaminan keamanan makanan. Untuk produk yang sudah mendapatkan izin, konsumen mengharapkan standar kualitas yang tinggi dan transparansi.⁴ Sedangkan untuk produk yang belum mendapatkan izin, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban atas potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan. Dengan produk yang belum mendapatkan izin maka pengusaha keripik usus ini belum mematuhi Undang-Undang. Ketika pengusaha patuh dengan Undang-Undang maka cenderung menjalankan bisnis secara etis, mematuhi keamanan pangan, dan menjaga kualitas produk. Produsen mendapatkan kepercayaan konsumen dan

² Jamilah, *Wawancara*, 15 Januari 2025, 18.30

³ Janus Sidabalok, *Hukum Lingkungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 51

⁴ Jamilah, *Wawancara*, 15 Januari 2025, 19.00

perlindungan hukum. Sebaliknya, orang yang tidak patuh pada undang-undang dapat menghadapi sanksi hukum, denda, atau bahkan penutupan usaha. Produsen juga berisiko kehilangan kepercayaan konsumen.⁵

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur berbagai ketentuan terkait hak konsumen, termasuk jaminan atas mutu, keamanan, dan kenyamanan produk.⁶ Namun dalam praktiknya masih sering ditemukan kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil. Salah satu contoh kasus yang menarik untuk diteliti adalah sistem garansi pada produk makanan yang diproduksi oleh usaha keripik usus di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Kosumen yang dapat dilanggar oleh pelaku usaha keripik usus yaitu terdapat pada pasal 4 dan 8 UUPK. Hal ini pada pasal 4 pelaku usaha keripik usus tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen sebelum masa garansi berlaku sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. kemudian pada pasal 8, pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan sehingga konsumen atau pemilik toko kelontong ragu dalam melakukan penjualan kepada produk.⁷

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 71

⁶ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 173

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hukum ekonomi syariah mengatur prinsip-prinsip transaksi berdasarkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dalam fiqh muamalah, terdapat konteks tanggung jawab pelaku usaha terhadap kualitas barang yang diperjualbelikan, yang mencakup kejujuran dalam informasi produk dan pemenuhan hak konsumen. Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan garansi dapat dikaitkan dengan pelanggaran prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi dasar akad jual beli. Objek atau barang yang diperjualbelikan belum memenuhi syarat *mabi' wa tsaman* yaitu *mal mutaqawwin*, yang artinya barang yang diperbolehkan syariat untuk memanfaatkannya, tetapi pada praktiknya barang yang diperjual belikan tidak mengandung manfaat karena barangnya rusak.

Penelitian ini termasuk kedalam Wanprestasi dalam hal melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Pada kasus ini termasuk kedalam wanprestasi karena kesengajaan, pelaku usaha keripik usus tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen sebelum masa garansi berlaku sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Adapun hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum positif, dimana UUPK termasuk kedalam Hukum Positif, peneliti ingin melihat apakah sistem garansi atau jaminan yang digunakan oleh produsen keripik usus telah memenuhi standar atau kesesuaian garansi atau tidak.

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti memilih Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Nggronggot, Kabupaten Nganjuk karena dusun ini adalah daerah yang mulai berkembang di bidang UMKM salah satunya adalah produk kripik usus. Alasan lain peneliti memilih Dusun

tersebut yaitu memiliki akses yang strategis terhadap bahan baku yang diperlukan untuk produksi kripik usus, seperti usus hewan yang berkualitas dan dusun Mergoyoso bertempat di lahan yang strategis, mudah dijangkau dengan kendaraan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan **“Perlindungan Konsumen Pada Produk Kripik Usus Perspektif Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isu hukum di atas, rumusan masalah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pada kripik usus di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana perspektif undang undang dan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pada produk kripik usus di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui praktik jual beli pada kripik usus di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
2. Untuk Mengetahui perspektif undang undang dan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pada produk kripik usus di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap sistem garansi pengembalian produk makanan tidak layak konsumsi maka akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai perlindungan konsumen terhadap sistem garansi pengembalian produk makanan tidak layak konsumsi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, penulis mengaharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah wawasan mengenai perlindungan konsumen terhadap sistem garansi pengembalian produk makanan tidak layak konsumsi.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literatur mengenai perlindungan konsumen terhadap sistem garansi pengembalian produk makanan tidak layak konsumsi dan dapat dijadikan telaah pada penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan penelitian selanjutnya dalam hal mengenai perlindungan konsumen terhadap sistem garansi pengembalian produk makanan tidak layak konsumsi.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi oleh Nadia Ayu Puji Trisnawati, 2020 dengan judul “Klaim Garansi Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Khiyar Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Konter Handphone Yully Cell Blitar), Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kediri”.⁸

Praktik klaim garansi jual beli handphone bekas dalam perspektif khiyar dengan terdapat beberapa ketentuan tentang klaim garansi yang dilakukan oleh Konter Handphone Yully Cell. Garansi tersebut diberikan secara lisan dalam tenggang waktu 1x24 jam. Garansi tersebut menggunakan garansi toko. Dalam praktik khiyarnya masa jaminan yang diberikan Konter Handphone Yully Cell hanya 1x24 jam tidak sesuai dengan ketentuan khiyar aib menurut Ulama Malikiyah dengan masa jaminan 3 (tiga) hari. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai garansi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah obyek yang menjadi penelitiannya.

2. Skripsi oleh Halima Tussyak Akdiah S, 2020 dengan judul “ Pengaruh Harga Dan Garansi LIFETIME Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tupperware Pada Desa Tupperware Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Ditinjau dari Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau⁹

Produk Tupperware memiliki harga yang tinggi jika dibandingkan dengan produk yang sejenis. Hal ini bertolak belakang dengan teori, yaitu

⁸ Nadia Ayu Puji Trisnawati, *Klaim Garansi Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Khiyar Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Konter Handphone Yully Cell Blitar)*, Skripsi, (Kediri, UIN Syekh Wasil Kediri, 2020)

⁹ Tussyak Akdiah S, *Pengaruh Harga Dan Garansi LIFETIME Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tupperware Pada Desa Tupperware Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Ditinjau dari Ekonomi Syariah*, Skripsi, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

jika harga produk rendah maka permintaan produk tinggi dan jika harga tinggi maka permintaan produk pun rendah. Walaupun Tupperware memiliki harga tinggi, namun harga tersebut sudah termasuk garansi lifetime, dimana garansi ini merupakan salah satu atribut produk yang menjadi pertimbangan seseorang dalam membeli produk. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai garansi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah penelitian ini ditinjau dengan ekonomi syariah dan penelitian milik penulis ditinjau dari UUPK.

3. Skripsi karya Lailatul Hasanah, 2022 dengan judul “Perjanjian Garansi Dalam Jual Beli Barang Bekas Elektronik Perspektif KUHPERDATA dan KHES, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁰

Garansi merupakan suatu bentuk jaminan tanggung jawab dari pelaku usaha atau penjual kepada konsumennya terhadap barang dan jasa yang dipasarkan sebagai suatu nilai tambah. Khiyar aib diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari ‘aqidain (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika ia menemukan objek cacat yang mana pihak lain tidak memberitahukannya saat akan terjadi. Terkait dalam hal tersebut diadakannya khiyar oleh syara’ agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing masing dalam akad jual belinya. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas

¹⁰ Lailatul Hasanah, *Perjanjian Garansi Dalam Jual Beli Barang Bekas Elektronik Perspektif KUHPERDATA dan KHES*, Skripsi, (UIN Malik Ibrahim Malang, 2022)

mengenai garansi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah obyek yang menjadi penelitiannya.

4. Skripsi karya Rafik Rahman, 2020 dengan judul “Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit dalam Perspektif Hukum Islam”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹¹

Dalam pelaksanaan garansi jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya diindikasikan terdapat unsur garar dan paksaan. Ketika konsumen membeli mesin jahit, konsumen diberi surat garansi yang di dalamnya telah tercantum beberapa ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh penjual. Sehingga pembeli tidak berhak menawar-nawar lagi terhadap syarat-syarat dan ketentuan tersebut. Dampak yang muncul kemudian adalah konsumen merasa ditipu atau dicurangi dan menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai garansi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah penelitian ini ditinjau dengan hukum islam sedangkan penelitian milik penulis menggunakan hukum positif.

5. Skripsi karya Irsal Fitra, 2020 dengan judul “Konsep Garansi dan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif), UIN Ar-Raniry)¹²

Dalam transaksi jual beli, kondisi barang yang menjadi objek transaksi disyaratkan harus sesuai dengan nilai atau harga jual dan terlepas

¹¹ Rafik Rahman, *Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahat dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2020)

¹² Irsal Fitra, *Konsep Garansi dan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum Darussalam-Banda Aceh, 2020)

dari kecacatan. Namun, jika objek transaksi tersebut memiliki cacat, maka diharuskan memberi jaminan. Namun konsep ini memiliki perbedaan-perbedaan mendasar, baik mengenai konstruksi hukumnya maupun dilihat dari segi prosedur operasionalnya. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai garansi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah dalam penelitian ini tidak ada objek yang spesifik.

6. Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 6 Issue 2 Februari 2023, Karya Prasetyo Sulisyanto, Budimah dengan Judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan”.¹³

Bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan impor yaitu dimana Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kemudian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Dalam jurnal ini terdapat persamaan dengan peneliti sekarang yaitu sama sama menggunakan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan. Adapula perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya menggunakan tinjauan yuridis perlindungan konsumen, sedangkan peneliti sekarang menggunakan UUPK dan Hukum Ekonomi Syariah.

¹³ Prasetyo Sulisyanto, Budimah, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 6 Issue 2 Februari 2023

7. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1 Juni 2022, Karya Alda Meydiyana Sagita dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee”.¹⁴

Pangan impor merupakan pangan olahan yang berasal dari luar negeri yang banyak dijual melalui *e-commerce* salah satunya adalah shopee, kebutuhan dan permintaan masyarakat khususnya di Indonesia terhadap produk pangan impor membuat para pelaku usaha terus menambah jumlah produk dan variasi produk pangan impor yang diperdagangkan. Akan tetapi, banyak pangan impor yang dijual melalui *e-commerce* shopee belum memiliki izin edar dari BPOM. Dalam jurnal ini terdapat persamaan dengan peneliti sekarang yaitu sama sama menggunakan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan. Adapula perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya menggunakan tinjauan yuridis perlindungan konsumen dan penjualan melalui shopee sedangkan peneliti sekarang menggunakan UUPK dan Hukum Ekonomi Syariah serta penjualan hanya di *offline*.

¹⁴ Alda Meydiyana Sagita, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1 Juni 2022